

ANALISIS KEBIJAKAN VERSI DUNN & IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Rokim

Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil

Abstract: Dunn's version of education policy analysis is an intellectual and practical activity to create assessment and communicate policies to produce relevant information. in the process of generating information using research methods and arguments to produce relevant information in analyzing social problems that might arise due to the application of a policy. The approach in policy analysis uses a descriptive and normative approach. Descriptive approaches aim to present information to decision makers, so that decision makers understand the problems that are being highlighted from a policy issue. In conducting education analysis, it is intended to see whether an educational idea is realistic and allows education policies to be implemented. As the problems that develop in the world of education, especially in Indonesia, there are several critical issues including the quality concept in education policy, school-based management, education issues non formal, early childhood education, boarding school. Critical issues of education policy in the era of regional autonomy.

Keyword: Dunn Version Policy Analysis, Implementation of Islamic Education

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki fungsi yang strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjalankan fungsi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang kependudukan, politik, ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. Hubungan antara pendidikan dan bidang-bidang kehidupan di luar pendidikan, perlu dibahas agar terjadi sinergi antara sistem internal pendidikan dan faktor eksternal tersebut. Dengan melakukan kajian terhadap keadaan dan permasalahan mengenai bidang-bidang kehidupan lain di luar pendidikan, beberapa permasalahan dan tantangan dalam pembangunan sistem pendidikan akan muncul ke permukaan. Tantangan masa depan bagi sistem pendidikan di Indonesia tidak semata-mata menyangkut bagaimana meningkatkan pendidikan secara internal, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesesuaian pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan lain.

Tuntutan yang paling mendesak dalam memacu pembangunan pendidikan yang bermutu dan relevan ialah meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis kebijakan. Para analis kebijakan dalam bidang pendidikan tidak hanya dituntut untuk

menguasai teknik-teknik penelitian dan pengembangan, tetapi juga dituntut untuk menguasai isu-isu pendidikan yang relevan, baik isu pendidikan secara internal maupun isu-isu pendidikan dalam kaitannya secara lintas sektoral. Isu-isu pendidikan secara internal meliputi sistem pendidikan berikut komponen-komponennya yang integral, seperti isu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, isu peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta isu penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Isu pendidikan secara eksternal juga penting untuk terus dikaji oleh para analis kebijakan, menyangkut keterkaitan yang integral antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat sebagai stakeholders pendidikan, dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Penguasaan terhadap isu-isu pendidikan, baik secara internal maupun eksternal, perlu dibentuk oleh suatu kelompok analis kebijakan pendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan secara interdisipliner. Penguasaan teknologi dalam penelitian dan pengembangan serta isu-isu kebijakan pendidikan tersebut harus senantiasa merupakan kekuatan yang perlu terus dikembangkan. Hal itu dilakukan agar mampu melahirkan berbagai gagasan yang berguna dalam upaya menghasilkan alternatif kebijakan dalam membangun sistem pendidikan yang efisien, bermutu, dan relevan dengan tuntutan masyarakat dalam berbagai bidang.

Dalam tulisan yang berjudul Analisis Kebijakan Versi Dunn dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam ini penulis ingin mempelajari teori-teori Dunn mengenai analisis kebijakan dan bagaimanakah penerapannya dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam.

PEMBAHASAN

A. Definisi Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Menurut Duncan MacRae (1976), analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik.¹ Lebih lanjut Suryadi dan Tilaar menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk pemecahan masalah kebijakan.

Definisi kerja analisis kebijakan menurut Dunn ialah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inquiri dan argumentasi berganda untuk

¹ Aceh Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan, Sebuah Pengantar* (Bandung: Rosdakarya, 1994) hal. 40

menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kebijakan.² Berdasarkan definisi di atas ada empat hal yang terkandung dalam definisi tersebut:

1. Sebagai ilmu sosial terapan, artinya suatu hasil nyata dari suatu misi ilmu pengetahuan yang terlahir dari gerakan profesionalisme ilmu-ilmu sosial.
2. Menghasilkan dan mendayagunakan informasi, ialah suatu bagian dari kegiatan analisis kebijakan yaitu pengumpulan, pengolahan, dan pendayagunaan data agar menjadi masukan yang berguna bagi para pembuat keputusan.
3. Menggunakan “metode inquiri” dan argumentasi berganda, ialah penggunaan jenis-jenis metode dan teknik dalam analisis kebijakan seperti metode yang sifatnya deskriptif, metode yang sifatnya preskriptif, metode yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif. Penggunaan metode tersebut sangat tergantung pada sifat isu kebijakan yang sedang disoroti.
4. Pengambilan keputusan yang bersifat politis, ialah suatu proses pendayagunaan informasi didalam proses pembuatan kebijakan publik.

Analisis kebijakan tidak semata-mata melakukan analisis terhadap data dan informasi, akan tetapi memperhatikan seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan, mulai dari analisis terhadap masalahnya, pengumpulan informasi, analisis, penentuan alternatif kebijakan, sampai kepada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan. Rumusan alternatif kebijakan yang dihasilkan dari suatu proses analisis kebijakan ini tidak dengan sendirinya atau secara langsung dapat dijadikan suatu kebijakan. Jika rumusan kebijakan ini sudah didukung oleh suatu kekuatan otoritas, alternatif, maka alternatif kebijakan itu sendiri akan berubah menjadi suatu kebijakan. Jadi prosedur yang dapat menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses rasional.³

Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, lingkungan kebijakan (*policy environment*) merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik, sehingga sistem kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari prakteknya.⁴

² *Ibid.*, hal. 42

³ <http://shaututtarbiyah.wordpress.com/2009/11/20/konsep-dasar-analisis-kebijakan-pendidikan-tinggi-ed-21-2009/>

⁴ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999)

Kebijakan, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dalam dunia pendidikan, kebijakan sekolah menjadi kata kunci dalam merumuskan tujuan umum dan spesifik sekolah, maka kebijakan sekolah harus benar-benar orientasinya kepada persoalan yang dihadapi oleh pendidikan itu sendiri, baik secara internal maupun eksternal yang disertai dengan upaya pembenahan, sehingga kualitas pelayanan sekolah dapat diwujudkan.⁵

Ali Imron menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan negara, memberikan pengertian kebijakan pendidikan (*educational policy*) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.⁶

Kebijakan pendidikan sangat erat hubungannya dengan kebijakan yang ada dalam lingkup kebijakan publik, misalnya kebijakan ekonomi, politik, luar negeri, keagamaan dan lain-lain. Konsekuensinya kebijakan pendidikan di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada perubahan kebijakan publik maka kebijakan pendidikan bisa berubah. Bahkan pergantian menteri dapat pula mengganti kebijakan yang telah mapan pada masanya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur untuk menghasilkan informasi kependidikan, dengan menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kependidikan.

B. Analisis Kebijakan Versi Dunn

Di antara ilmuwan analisis kebijakan, barangkali Dunn paling banyak dikenal di Indonesia. William N. Dunn adalah Profesor dalam Analisis Kebijakan di University of Pittsburgh Amerika Serikat yang telah dikenal luas kepakarannya dalam bidang ini. Karena itu buku karyanya menjadi referensi penting dalam pengajaran analisis kebijakan di banyak universitas di dunia. Beberapa karyanya telah diterjemahkan oleh para pengajar Universitas Gadjah Mada dan beredar luas di kalangan mahasiswa.⁷

Analisis kebijakan versi Dunn adalah analisis kebijakan yang dipahami sebagai sebuah aktifitas intelektual dan praktis yang bertujuan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses analisis kebijakan. Menurut Dunn, analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan

⁵ Muhtar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) hal. 33

⁶ Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hal. 36

⁷ <http://www.belbuk.com/pengantar-analisis-kebijakan-publik-edisi-2-p-13375.html>

berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Analisis kebijakan adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya. Kegiatan penganalisisan kebijakan dapat bersifat formal dan hati-hati yang melibatkan penelitian mendalam terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi suatu program yang telah dilaksanakan.⁸

Dalam metode analisis versi Dunn terdapat lima prosedur yang harus dilewati dalam sebuah proses analisis kebijakan, yaitu :

1. Definisi: Menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
2. Prediksi: Menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika melakukan sesuatu.
3. Preskripsi: Menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi kebijakan di masa datang.
4. Deskripsi: Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu diterapkannya alternatif kebijakan.
5. Evaluasi: Kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.

Adapun tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan menurut Dunn adalah sebagai berikut:

1. Fase Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*); di sini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.
2. Fase Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*); di sini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.
3. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*); di sini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan/atau konsensus kelembagaan.
4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*); di sini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama finansial dan manusia.
5. Penilaian Kebijakan (*Policy Assesment*); di sini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi menilai apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan.

⁸ <http://bakripasca.blogspot.com/2012/08/fungsi-dan-struktur-argumen-dalam.html>

Dalam tahapan diatas selalu disertai dengan prosedur analisis kebijakan, yang dimulai dengan perumusan masalah, peramalan (prediksi), rekomendasi, pemantauan serta evaluasi. Prosedur analisis ini digunakan untuk mengubah *scientific information* menjadi *policy relevant information*. Hal tersebut dapat terlihat pada skema berikut:⁹

Kelima tahap *pembuatan kebijakan* yang dinilai *paralel* dengan tahapan *analisis kebijakan*, yaitu:¹⁰

Analisis Kebijakan	Pembuatan Kebijakan
Perumusan Masalah	Penyusunan Agenda
Peramalan	Formulasi Kebijakan
Rekomendasi	Adopsi Kebijakan
Pemantauan	Implementasi Kebijakan
Penilaian	Penilaian Kebijakan

Lebih lengkapnya, **proses analisis kebijakan** tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. *Merumuskan masalah*. Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Fase-fase perumusan masalah meliputi pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah.
2. *Peramalan masa depan*. Peramalan atau *forecasting* adalah prosedur untuk membuat informasi aktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan.
3. *Rekomendasi kebijakan*. Tugas membuat rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan menentukan alternatif yang terbaik dan *mengapa*. Karenanya prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral. Dalam rekomendasi kebijakan terdapat enam kriteria utama, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan (*equity*), responsivitas, dan kelayakan.
4. *Pemantauan hasil kebijakan*. Pemantauan atau *monitoring* merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan, setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan, yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan dan kepatuhan (*compliance*).

⁹ <http://lembahperasaan.blogspot.com/2010/03/teori-analisis-kebijakan.html>

¹⁰ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hal. 8-11

5. *Evaluasi kinerja kebijakan*. Jika pemantauan menekankan pada pembentukan premis-premis faktual mengenai kebijakan publik, evaluasi menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan "Apa perbedaan yang dibuat?".¹¹

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin ilmu dengan tujuan memberikan informasi yang bersifat *deskriptif*, *evaluatif*, dan/ atau *preskriptif*. Menurut Dunn, analisis kebijakan harus dapat menjawab tiga macam pertanyaan yaitu:

1. Nilai, yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk menilai apakah suatu masalah sudah teratasi.
2. Fakta, yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai.
3. Tindakan, yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.

Sementara itu, beberapa langkah umum dalam melakukan analisis kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan masalah,
2. Identifikasi tujuan,
3. Identifikasi alternatif penyelesaian masalah,
4. Analisis manfaat dan biaya,
5. Komunikasi dengan stakeholder (dapat dilaksanakan di semua tahapan),
6. Penentuan opsi terbaik dalam menyelesaikan masalah,
7. Perumusan strategi implementasi kebijakan, dan
8. Memonitor dan mengevaluasi kebijakan.¹²

C. Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan

Pendekatan dalam analisis kebijakan menggunakan pendekatan deskriptif dan normatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menyajikan informasi apa adanya kepada pengambil keputusan, agar pengambil keputusan memahami permasalahan yang sedang disoroti dari suatu isu kebijakan. Sedangkan pendekatan normatif bertujuan untuk membantu para pengambil keputusan dalam memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan dapat memecahkan suatu kebijakan. Dunn menambahkan satu pendekatan lagi yang sejalan dengan pendekatan deskriptif yaitu pendekatan evaluatif, yaitu menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan atau program.

Pendekatan normatif yang sering juga disebut pendekatan prespektif merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah. Tujuan pendekatan ini ialah membantu mempermudah para pemakai hasil penelitian dalam menentukan

¹¹ William N. Dunn, *Ibid.*, hal. 16-27

¹² <http://mario-publichealth.blogspot.com/2008/11/analisis-kebijakan-versi-dunn.html>

atau memilih salah satu dari beberapa pilihan cara atau prosedur yang paling efisien dalam menangani atau memecahkan masalah.

Analisis kebijakan pendidikan sebagai salah satu cabang ilmu sosial terapan juga menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk menyajikan informasi apa adanya kepada pengambil keputusan. Tujuan dari pendekatan deskriptif dalam analisis kebijakan pendidikan agar para pengambil keputusan memahami permasalahan yang sedang disoroti dari suatu isu kebijakan. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam bentuk pemikiran-pemikiran mengenai cara atau prosedur yang paling efisien dalam memecahkan suatu masalah kebijakan publik.¹³

D. Penerapan Analisis Kebijakan Dalam Pendidikan Islam

Perumusan masalah merupakan tahapan paling mendasar dalam proses formulasi kebijakan. Karena tahap ini adalah merumuskan apa sebenarnya yang menjadi masalah kebijakan untuk segera dipecahkan. Tahapannya bermula dari pengakuan atau “dirasakannya keberadaan” suatu situasi masalah. Perpindahan dari situasi masalah harus melalui suatu “pencarian masalah” yang masih multi tafsir, kemudian perpindahan menuju permasalahan paradigmatis (substantive problem) dilalui melalui “pendefinisian masalah”, sampai akhirnya dapat ditemukan spesifikasi masalah yang kemudian menjadi agenda setting dari suatu kebijakan (formal problem). Dari masalah formal yang telah spesifik menjadi kebijakan, kemudian kembali lagi pada situasi masalah yang merupakan hasil dari “pengenalan masalah”. Dalam perumusan masalah merupakan titik krusial yang membutuhkan niat baik atau pun komitmen dari otoritas pemerintah, sehingga pada tahapan - tahapan yang dilalui tersebut dapat menghasilkan klasifikasi secara jelas dan tegas, mana yang termasuk masalah privat dan mana masalah yang tergolong masalah publik.

Secara umum, Analisis Dunn dapat diaplikasikan dalam Rencana kebijakan pemerintahan untuk menaikkan harga BBM dengan alasan APBN negara terbebani berat oleh pemberian subsidi BBM. Langkah pemerintah ini merupakan langkah-langkah perumusan masalah secara sepihak tanpa melibatkan publik atau para aktor di tingkat legislatif dan kelompok strategis lainnya. Sehingga yang terjadi adalah pemerintah telah mencapai tahap menemukan spesifikasi masalah (formal problem), sedangkan masyarakat sedang berada dalam tahapan mengakui “situasi bermasalah”. Publik sebenarnya meletakkan masalah utamanya adalah mengapa negara Indonesia yang kaya sumber daya alam di bidang gas, minyak dan hasil tambang lainnya, harus melakukan impor dari luar negeri.

¹³ <http://shaututtarbiyah.wordpress.com/2009/11/20/konsep-dasar-analisis-kebijakan-pendidikan-tinggi-ed-21-2009/>

Kajian substansi dari argumentasi kebijakan dimaksudkan untuk menguji apakah suatu gagasan cukup realistis. Untuk memperoleh usulan kebijakan yang diuji kemungkinan penerapannya berdasarkan analisis ekonomi, pendidikan, politik, sosiologis, dan administratif sehingga setiap gagasan pembaharuan benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi objektif yang ada. Dalam melakukan analisis pendidikan dimaksudkan untuk melihat apakah suatu gagasan pendidikan cukup realistis dan memungkinkan kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut diterapkan.¹⁴

Adapun masalah yang berkembang dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia ada beberapa isu kritis diantaranya adalah konsep mutu dalam kebijakan pendidikan, manajemen berbasis sekolah, isu mengenai pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, boarding school. Isu-isu kritis kebijakan pendidikan era otonomi daerah.

PENUTUP

Analisis kebijakan tidak semata-mata melakukan analisis terhadap data dan informasi, akan tetapi memperhatikan seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan, mulai dari analisis terhadap masalahnya, pengumpulan informasi, analisis, penentuan alternatif kebijakan, sampai kepada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan.

Menurut Dunn, analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Analisis kebijakan adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya secara tindakan berfikir kritis dan praktis untuk menciptakan dan mengkomunikasikan analisis kebijakan.

Pendekatan dalam analisis kebijakan menggunakan pendekatan deskriptif dan normatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menyajikan informasi apa adanya kepada pengambil keputusan. Sedangkan pendekatan normatif bertujuan untuk membantu para pengambil keputusan dalam memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan dapat memecahkan suatu kebijakan. Pendekatan dalam analisis kebijakan menggunakan pendekatan deskriptif dan normatif. Analisis kebijakan pendidikan sebagai salah satu cabang ilmu sosial terapan juga menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk menyajikan informasi apa adanya kepada pengambil keputusan. Pendekatan

¹⁴ <http://mario-publichealth.blogspot.com/2008/11/analisis-kebijakan-versi-dunn.html>

normatif dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam bentuk pemikiran-pemikiran mengenai cara atau prosedur yang paling efisien dalam memecahkan suatu masalah kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Suryadi, Aceh dan H.A.R. Tilaar. 1994. *Analisis Kebijakan Pendidikan, Sebuah Pengantar*. Bandung: Rosdakarya.
- William N. Dunn. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhtar. 2009. *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada.
- Imron, Ali. 2006. *Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- <http://shaututtarbiyah.wordpress.com/2009/11/20/konsep-dasar-analisis-kebijakan-pendidikan-tinggi-ed-21-2009/>
- <http://www.belbuk.com/pengantar-analisis-kebijakan-publik-edisi-2-p-13375.html>
- <http://bakripasca.blogspot.com/2012/08/fungsi-dan-struktur-argumen-dalam.html>
- <http://lembahperasaan.blogspot.com/2010/03/teori-analisis-kebijakan.html>
- <http://mario-publichealth.blogspot.com/2008/11/analisis-kebijakan-versi-dunn.html>
- <http://shaututtarbiyah.wordpress.com/2009/11/20/konsep-dasar-analisis-kebijakan-pendidikan-tinggi-ed-21-2009/>
- <http://shaututtarbiyah.wordpress.com/2009/11/20/konsep-dasar-analisis-kebijakan-pendidikan-tinggi-ed-21-2009/>
- <http://www.belbuk.com/pengantar-analisis-kebijakan-publik-edisi-2-p-13375.html>
- <http://bakripasca.blogspot.com/2012/08/fungsi-dan-struktur-argumen-dalam.html>
- <http://lembahperasaan.blogspot.com/2010/03/teori-analisis-kebijakan.html>
- <http://mario-publichealth.blogspot.com/2008/11/analisis-kebijakan-versi-dunn.html>
- <http://shaututtarbiyah.wordpress.com/2009/11/20/konsep-dasar-analisis-kebijakan-pendidikan-tinggi-ed-21-2009/html>